



DINAMIKA KERAWANAN SOSIAL MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

Kasmanto Rinaldi

Universitas Islam Riau

(Naskah diterima: 3 Juni 2016, disetujui: 10 Juli 2016)

Abstract

Poverty is a complex problem seemed to be a perennial problem like a circle that has no end and always rotates growing and increasingly impacting Social luas.Dinas and Cemetery is an authorized agency in the welfare activities of social life masyarakat.Kewenangan social order that is part of the development in sosial.Kewenangan comprehensive welfare can be seen as an opportunity for the region to develop and commit itself for the sake of progress of the region, and on the other hand is a new challenge that is quite heavy and menantang.kurangnya plan as curbing targets that are less precise, the execution time is executed less precise in controlling the schedule, the absence of special shelters Psychotic Gelandagan or people with mental disorders were displaced and many other issues is a major obstacle that must be overcome.

Keywords: Dynamics, Welfare, Social.

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit seakan-akan menjadi persoalan abadi seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan selalu berputar semakin membesar serta berdampak semakin luas.Dinas Sosial dan Pemakaman merupakan instansi yang berwenang dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat.Kewenangan kegiatan ketertiban sosial yang merupakan bagian dari pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.Kewenangan yang luas dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang.kurangnya rencana seperti sasaran penertiban yang kurang tepat, waktu pelaksanaan yang dilaksanakan kurang tepat pada jadwal penertiban, tidak adanya tempat penampungan khusus Psikotik Gelandagan atau penderita gangguan jiwa yang terlantar dan banyak persoalan lainnya merupakan hambatan besar yang harus diatasi.

Kata Kunci :*Dinamika, Kesejahteraan, Sosial.*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia masih berada dalam pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alinia ke empat, yaitu untuk melindungi segenab bang-sa Indonesia dan untuk memajukan kesejah-teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban du-nia yang berdasarkan kemerdekaan, perda-maian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumusan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Kesejahteraan

Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit seakan-akan menjadi persoalan abadi seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan selalu berputar semakin membesar serta berdampak semakin luas. Meskipun penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan dalam jumlah 318.541, akan tetapi faktor ekonomi tetap menjadi salah satu penyebab dari adanya penderita gangguan jiwa yang tersebar di jalan-jalan dan hidup dibawah kolong-kolong jembatan. Selain faktor kemiskinan yang menyebabkan seseorang mengalami sakit jiwa juga bisa disebabkan oleh faktor keluarga, masyarakat, akibat obatan dan faktor keturunan juga semakin menambah dan meningkatnya penderita gangguan jiwa di berbagai daerah dan khususnya di daerah perkotaan. permasalahan di perkotaan pada permasalahan kesejahteraan sosial khususnya permasalahan penderita gangguan jiwa maka di susunlah pemerintah dalam bentuk susunan pemerintah pusat dan pemerintah.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pusat yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Lewat semangat otonomi daerah setiap daerah yang berlomba-lomba dalam membangun daerah demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Kencana (2008;25) gelandangan psikotik adalah mereka yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami gangguan kejiwaan yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan. Dalam gelandangan psikotik ini mereka sudah tidak memiliki pola pikir yang jelas dan mereka sudah tidak lagi mementingkan norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, selain itu juga mereka sudah tidak memiliki rasa

malu dan memiliki amarah yang tidak bisa terkendalikan.

Dinas Sosial dan Pemakaman merupakan instansi yang berwenang dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru pada khususnya. Kewenangan kegiatan ketertiban sosial yang merupakan bagian dari pembangunan dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat. Untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial tersebut didukung pula dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Menjalankan suatu organisasi yang berguna untuk melayani masyarakat, maka didalamnya harus diperhatikan keberadaan dan kemampuan dari para pegawai. Agar tercapai organisasi yang baik dan agar segala rencana yang telah diterapkan dapat terlaksana dengan baik. Pada prinsipnya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat tidak terkecuali aparat pemerintah Dinas Sosial dan Pemakaman

Kota Pekanbaru serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penertiban psikotik gelandangan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemasakan Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 dijelaskan tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Khususnya disini tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

5. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

6. Jumlah dan Jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan Tugas Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Menurut Usman (2013;488) Koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dan pemanfaatan koordinasi yaitu mewujudkan KIS (Koordinasi, Intergrasi, dan Singkronisasi agar tujuan koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan pendekatan yang digunakan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem memandang koordinasi sebagai pengintegrasikan, pengsinkronisasian dan penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus oleh sejumlah individu atau unit sehingga semua bersatu dalam jumlah yang tepat. Menurut Malayu (2012;1) Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu:

1. Adanya kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal.
2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai.
3. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.

Siagian (2008;5) Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan majeterial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen mempunyai dua tugas utama yaitu:

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai.
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang meningkat seluruh orgaisasi.

James A.F Stoner dan Charles Wankel (Siswanto 2008;2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi mencapai tujuan

organisasi. Menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam batasan manajemen diatas prosesnya meliputi:

1. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
2. Pengorganisasian, yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
3. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan kerja sebaik mungkin.
4. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Bratas (2009;4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu sekelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional.

Samsudin (2010;15) mengemukakan Manajemen yaitu Bekerja dengan orang-orang mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia dan kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

Handoko (2009;8) Manajemen adalah Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Jadi manajemen sangat penting bagi setiap organisasi terutama bagian manajemen, karena setiap manajer atau pemimpin memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur organisasi yang dipimpinnya.

2. Manajemen Sumber Daya

Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kebutuhan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi mencapai maka dibutuhkan ilmu, metode pendekatan pengelolaan sumber daya manusia atau sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Ini berarti bahwa sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen (*management service*) yang mengacu kepada fungsi manajemen yang dalam pelaksanaannya meliputi proses-proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah Suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah Manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah organisasi, Karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari manusia.

Pengertian manajemen sumber daya manusia banyak dikemukakan oleh para ahli manajemen. Menurut Sedarmayanti (2009;13) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, member penghargaan dan penilaian.

Sedangkan menurut Samsudin (2010;22) manajemen sumber daya manusia suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen sumber daya manusia yang efektif yang mengharuskan manajer menemukan cara terbaik dalam memperkerjakan orang-orang atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Empat hal penting berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan.
- b. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen keseluruhan.
- c. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan.
- d. Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer agar dapat berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator.

Selanjutnya menurut Malayu (2012;10) manajemen sumber daya manusia seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley dalam Iswandi (2013;23) melihat Kesejahteraan Sosial sebagai Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan

baik. Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila. Pokok-pokok pikiran bahwa konsepsi kesejahteraan sosial menuju kepada

1. Kondisi statistik atau keadaan sejahtera, yakni pemenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis.
3. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan.

4. Konsep Psikotik Gelandangan

Menurut Kencana (2008;25) Gelandangan psikotik adalah mereka yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami *gangguan kejiwaan* yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang dijalanan. Dalam gelandangan

psikotik ini mereka sudah tidak memiliki pola pikir yang jelas dan mereka sudah tidak lagi mementingkan mengenai norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, selain itu juga mereka sudah tidak memiliki rasa malu dan memiliki amarah yang tidak bisa terendalikan.

Menurut Sarma dan Sarniem (2009;80) Ciri-ciri gelandangan psikotik yaitu:

- a. Tingkah laku dengan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik. Kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensi sosial, fanatik dan sangat individualistis selalu bertentangan dengan lingkungan dan norma.
- b. Bersikap kasar tanpa sebab.
- c. Pribadi yang tidak stabil, respon yang kurang tepat dan tidak dapat untuk dipercaya.
- d. Tidak memiliki kelompok.

Kriteria Psikotik meliputi :

- a. Psikotik organik yaitu psikotik yang faktor penyebabnya adalah gangguan pada pusat susunan syaraf dan psikotik yang di sebabkan oleh kondisi fisik, gangguan endoktrin, gangguan metabolisme, intoksikasi obat setelah pembedahan atau setelah melakukan pengobatan.
- b. Psikotik fungsional (psikogenik) yaitu psikotik yang di sebabkan oleh adanya gangguan pada kepribadian seseorang

yang bersifat psikogenitik yaitu perpecahan kepribadian, atau seperti psikotik paranoid atau selalu curiga pada orang lain.

Faktor-faktor penyebab Psikotik :

- a. Tekanan-tekanankehidupan (*emosional*).
- b. Kekecewaan (*frustasi*) yang tidak pernah mendapat penyelesaian.
- c. Adanya hambatan yang terjadi pada masa tumbuh dan kembang seorang individu.
- d. Kecelakaan yang menimbulkan kerusakan pada gangguan otak.
- e. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun masyarakat sekitar (*sosio budaya*).

5. Konsep Koordinasi

Manusia adalah makhluk sosial dan organisasional. Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi. Koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan besar, baik dalam organisasi yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu dikoordinasikan.

Menurut Usman (2013;488) Koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Sutisna (dalam

Usman 2013;488) Koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber-sumber lain kearah terciptanya maksud-maksud yang ditetapkan.

Menurut Tjokroamidjojo (1997;53) Koordinasi adalah upaya memadukan (*mengintegrasikan*), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Kemudian Sarana atau Mekanisme Koordinasi menurut Tjokroamidjojo (1997;55-56) adalah:

1. Kebijakan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan.
2. Rancangan, digunakan sebagai alat koordinasi karena di dalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakan dan lokasi.
3. Prosedur dan Tata Kerja, digunakan sebagai alat koordinasi karena di dalamnya memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubungan.

Untuk itu prosedur perlu dituangkan dalam manual, petunjuk pelaksanaan (*juklak*), petunjuk teknis (*juknis*) atau pedoman kerja agar mudah diikuti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Rapat dan Taklimat, digunakan sebagai sarana koordinasi untuk memberikan pengarah, memperjelas atau menegaskan kebijaksanaan sesuatu masalah.
5. Surat keputusan bersama, digunakan untuk memperlancar penyesuaian sesuatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, dapat diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau Surat Edaran Bersama. Sangat efektif dalam mewujudkan kesepakatan dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas antara dua atau lebih instansi yang terkait. Di tindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun oleh masing-masing instansi secara serasi dan saling menunjang.

Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa koordinasi juga menjadi tugas pokok pimpinan. Ini berarti setiap pimpinan harus berkemampuan untuk menggerakkan serta mengkoordinir orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, uang, metoda, mesin-mesin dan lainnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau ke-

mampuan untuk menggerakkan serta mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen itu sendiri dan pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekacauan dan kekosongan pekerjaan.

Menurut White (dalam Syafiie 2006;85) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian diri.
2. Waktu yang cocok.
3. Sumbangan terbanyak.
4. Hasil.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok terhadap usaha individu yang bekerja sama untuk mencapai hasil kegiatan secara keseluruhan diselesaikan tepat pada waktunya sesuai sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan usaha untuk mensinkronisasikan jumlah dan waktu secara tepat dalam suatu tindakan.

Sedangkan menurut Fayol dalam Syafiie (2006;85) Koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Menurut Handoko (2003;195) adalah Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tiga pendekatan untuk koordinasi yang efektif (Handoko, 2003;199-200) adalah

1. Hirarki Manajerial adalah Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang cepat.
2. Aturan dan Prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang di-buat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3. Rencana dan Penetapan tujuan adalah Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Dari pengertian-pengertian koordinasi di atas menurut Syafiie (2006;86) menyimpulkan bahwa unsur-unsur koordinasi meliputi :

1. Pengaturan.
2. Sinkronisasi.

3. Kepentingan bersama.

4. Tujuan bersama

Menurut E.F.L Brech dalam Hasibuan (2007;85) Koordinasi adalah mengimbangi dan meggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

6. Gambaran Umum Dinas Sosial

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya, sementara penjajah belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kenyataan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela melepas begitu saja, maka terjadilah

pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Di dalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. .

7. Simpulan

Dari hasil penelitian Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pknbaru, dapat disimpulkan pada kategori untuk personil Satpol PP berada pada kategori presentase Cukup Baik dan untuk pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada pada kategori presentase Cukup Baik. Maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat diketahui Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemkaman Kota Pekanbaru memang belum terlaksana dengan baik, khususnya pada indikator rencana, penulis melihat kurangnya rencana seperti sasaran penertiban yang kurang tepat, waktu pelaksanaan yang dilaksanakan kurang tepat pada jadwal penertiban, tidak adanya tempat penampungan khusus Psikotik Gelandangan atau penderita gangguan jiwa yang terlantar.

Daftar Pustaka

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Haris Budiyono, Amrullah., 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen Edisi(dua)*. Yogyakarta.BPFE Yogyakarta.
- Inu, Kencana.2008.*Mereka bilang kalo aku sakit jiwa Refeksi kasus-kasus psikiatri dan problematika kesehatan jiwa di Indonesia*. Yogyakarta
- Pasalong, Harbani P. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfa Beta.
- Salma, Sri dan Sarniem. 2009. *Pelayanan Rehabilitas Gelandangan Psikoti dipanti margo widodo*.Semarang Jawa Tengah.
- Syafie, Inu Kencana.2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Askara
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Refisi*. Jakarta. Bumi Askara.
- Samsudin, Sadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan. Gp Press Group.
- Sedarmayanti., 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak., 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Suharto , Edi. 2012. *Analiis Kebijakan Publik*.Bandung , Alfabeta.
- Ruminto Adi, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*.Jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- Usman, Husaini.,2013. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.